

ABSTRAK

Alih Kelola Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Timur merupakan pilot project untuk menunjukan keefektifan, mengetahui dampak serta keekonomisan suatu pelaksanaan program atau kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari otonomi daerah sehingga memberikan peran kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan membandingkan regulasi tentang pelimpahan wewenang Pelabuhan Pengumpan Regional kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom akibat dari pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan faktual melalui objek kajian di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi yaitu Pelabuhan Sapeken, Kangean dan Masalembu. Kemudian menyimpulkan bahwa pendelegasian wewenang dalam hal alih kelola Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Timur sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dengan syarat yang harus terpenuhi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci : Alih Kelola, Pelabuhan Pengumpan Regional, Otonomi Daerah.

ABSTRACT

Transfer of management of Regional Feeder Ports in East Java is pilot project to demonstrate effectiveness, determine the impact and economy of a program or policy implementation. The policy is an implementation of regional autonomy so that it gives roles to Local Governments according to their authority in managing ports. This study aims to analyze, find out and compare regulations regarding the delegation of authority of Regional Feeder Ports to the Regional Government of East Java Province as an autonomous region as a result of the division of concurrent government affairs based on Legislation in accordance with Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Constitution of the Republic of in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research is a type of empirical legal research and uses a conceptual approach and a factual approach through the object of study in The Working Area Banyuwangi Regional Feeder Port Technical Implementation Unit, namely the Ports Of Sapeken, Kangean and Masalembu. Then concluded that the delegation of authority in terms of the transfer of management of Regional Feeder Ports in East Java is a form of implementing regional autonomy with conditions that must be fulfilled which are regulated based on Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 concerning Regional Government.

Keywords : Management Transfer, Regional Feeder Port, Regional Autonomy.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya, sehingga Tesis yang berjudul **“Alih Kelola Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”** ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terima kasih setulusnya kepada :

- 1) Dr. Safi, SH., MH., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
- 2) Dr. Erma Rusdiana, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura serta segenap jajaran Dekanat Fakultas Hukum UTM.
- 3) Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., MH., (Pembimbing I) dan Dr. Devi Rahayu, SH., M.Hum., (Pembimbing II) dengan dedikasi tinggi membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini.
- 4) Para Dosen Tim Penguji yang telah rela meluangkan waktu dan dengan ikhlas memberikan keilmuannya demi kesempurnaan Tesis ini.
- 5) Keluarga tercinta, Ach. Fahrur Rozi, SH. (suami), Kakak Arya, Adik Azza, Alm. Papa, Mama, Umi dan segenap keluarga besar yang telah memberi motivasi serta doa yang terbaik bagi Penulis sampai pada titik yang diharapkan.
- 6) Keluarga Besar UPT PPR Banyuwangi dan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang telah menjadi *support system* terbaik untuk perampungan Tesis ini.
- 7) Seluruh Dosen dan staf Program Magister Ilmu Hukum UTM yang selalu memberikan semangat, motivasi serta ilmu kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat Penulis harapkan untuk perbaikan Tesis ini. Harapan Penulis agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Bangkalan, Januari 2023
Penulis

Lely Evi Susanty

DAFTAR ISI

Sampul Depan		
Halaman Sampul Dalam		
Halaman Persetujuan		ii
Halaman Pengesahan		iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas		iv
Halaman Identitas Tim Penguji		v
Halaman Abstrak		vi
Halaman Kata Pengantar		vii
Halaman Daftar Isi		viii
Halaman Daftar Singkatan		ix
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang Masalah		1
1.2 Rumusan Masalah		6
1.3 Tujuan Penelitian		6
1.4 Manfaat Penelitian		7
1.5 Keaslian Penelitian		7
1.6 Metode Penelitian		
1) Jenis Penelitian		10
2) Pendekatan Penelitian		11
3) Sumber Data		12
4) Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data		14
5) Analisis Data		15
BAB II TINJAUAN UMUM WEWENANG PEMERINTAH TENTANG ALIH KELOLA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL		
2.1 Teori Kewenangan		16
2.2 Teori Otonomi Daerah		21
2.3 Teori Kelembagaan		37
2.4 Teori Implementasi Kebijakan		42
BAB III PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELABUHAN PADA ALIH KELOLA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL DI JAWA TIMUR		
3.1 Tinjauan Umum Wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur		47
3.2 Konsep Otonomi Daerah dalam Pemberian wewenang Alih Kelola Pelabuhan Pengumpan Regional Kepada Provinsi Jawa Timur		57
3.3 Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelabuhan pada Alih Kelola P3D Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Timur		69
BAB IV PENUTUP		
4.1 Kesimpulan		88
4.2 Saran		89
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR SINGKATAN

UUD	=	Undang-Undang Dasar
NRI	=	Negara Republik Indonesia
UU	=	Undang-Undang
NKRI	=	Negara Kesatuan Republik Indonesia
P3D	=	Personil, Pendanaan, sarana dan Prasarana serta Dokumen
PPR	=	Pelabuhan Pengumpan Regional
UPP	=	Unit Penyelenggara Pelabuhan
RIPN	=	Rencana Induk Pelabuhan Nasional
PP	=	Peraturan Pemerintah
PU	=	Pelabuhan Utama
PP	=	Pelabuhan Pengumpul
PPL	=	Pelabuhan Pengumpan Lokal
UPT	=	Unit Pelaksana Teknis
APBN	=	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	=	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BAST	=	Berita Acara Serah Terima
KSOP	=	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
PM	=	Peraturan Menteri
KP	=	Keputusan menteri Perhubungan
RPJMD	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah